

IMPLEMENTASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BONERATE KECAMATAN PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Andi Ratu^{1*}, Muh.Isa Ansyari², Hafiz Elfiansyah Parawu³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine how successful the implementation of the village government work plan in development in Bonerate Village. This study used qualitative research. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. Data analysis used the theory of Jan Marse, which consisted of four things that influenced policy implementation, namely information, policy content, community support, and potential sharing. The result of this research showed that the implementation of the village government work plan in the development of Bonerate Village had not been optimally realized, because there was lack of public understanding of information about village work plans, there were other influencing factors such as the content of policies that were not right on target, lack of community participation or community support in development. Inadequate Village and Village Potential.

Keywords: *implementation, work plan, development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kesuksesan implementasi rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Bonerate. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data berdasarkan teori Jan Marse yang terdiri dari empat hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian Potensi. Hasil penelitian ini yaitu implementasi rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan Desa Bonerate belum terelalisasi dengan optimal, karna masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi mengenai rencana kerja desa, adanya fator lain yang mempengaruhi seperti isi kebijakan kurang tepat sasaran, kurang partisipasi masyarakat atau dukungan masyarakat dalam pembagunan Desa dan Potensi Desa yang belum memadai.

Kata kunci: implementasi, rencana kerja, pembangunan

* andiratu@gmail.com

PENDAHULUAN

Berbagai upaya dengan tujuan pengembangan masyarakat secara terus menerus dilakukan, baik melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam proses perubahan sosial, melalui penguatan pelayanan masyarakat oleh pemerintah desa dan melalui upaya pemantapan lembaga pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan dalam menunjang kegiatan sosial, ekonomi, masyarakat Alfaturrahman (2016). Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

Pembangunan desa merupakan suatu program yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban politis Negara dengan mengarahkan semua kemampuan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan politik Negara guna mencapai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya Cristian (2015). Oleh karena itu perencanaan suatu program pemerintahan sangat menunjang keberhasilan suatu pencapaian atau tujuan. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik tidak hanya berdasar pada pemerintah, akan tetapi harus adanya partisipasi atau keterlibatan

seluruh elemen, baik masyarakat interen birokrasi, dan pihak swasta. Program Rencana Kerja pembangunan desa merupakan salah satu program unggulan pemerintah Desa Bonerate dalam bidang pembangunan desa. Yang dimana Desa Bonerate merupakan salah satu desa di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 3 Dusun dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.620 jiwa. Desa Bonerate merupakan salah satu desa tertinggal, sehingga pemerintah berinisiatif untuk melakukan suatu usaha agar desa Bonerate bisa menjadi desa yang berkembang dan menjadi desa yang mandiri. Sehingga dari keterbelakangan tersebut pemerintah melakukan sesuatu dengan program kerja yang telah di rencanakan.

Kurangnya partisipasi masyarakat Desa Bonerate untuk ikut dalam kegiatan pembangunan. Masih ada program kegiatan RKP Desa Bonerate yang belum terealisasi khususnya dalam bidang pembangunan Desa Bonerate.

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dey dalam Mulyadi (2016) adalah *“Whatever Governments choose to do or not to do”* Kebijakan publik adalah segala sesuatu

yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Kebijakan Publik yaitu suatu kebijakan yang terbentuk karena di dasari adanya permasalahan yang berkaitan dengan publik dan masalah tersebut banyak macamnya, variasinya, dan intensitasnya. Tidak semua masalah publik dapat melahirkan kebijakan publik, Melainkan hanya masalah-masalah yang berkaitan dengan orang banyak dan mampu mengerakkan orang banyak dalam memperoleh solusi yang bisa menghasilkan kebijakan publik Dr.Widodo, Joko dalam Florensi (2014). Menurut Thoha dalam Ramdhani dan Ramdhani (2017) Memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai hasil suatu rumusan dari pemerintahan. Dalam pandangan ini kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan dari proses hasil yang dibuat.

Aspek yang mempengaruhi kebijakan publik Menurut Edwars III dalam Ramdhani dan Ramdhani (2017) ada empat yaitu: (1) komunikasi yang diman komunikasi adalah aktivitas yang menyebabkan orang lain menginterpretasikan gagasan/ide, terutama yang dimaksudkan oleh penulis melalui sistem biasa baik

dengan simbol-simbol, perilaku, maupun signal-signal. Wardani Hasiolan & Minarsih (2016) dalam Ramdhani dan Ramdhani (2017). Kemudian Winarno (2012) dalam Ramdhani dan Ramdhani (2017) Komunikasi mempengaruhi kebijakan publik, yang dimana konunikasi yang tidak terlaksan dengan baik dapat menghasilkan akibat yangt buruk bagi pelaksana kebijakan.

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan publik harus didukung dengan adanya sumber daya baik sumberdaya (manusia, metode atau materi). Pelaksanaan Kebijakan Publik perlu dilaksanakan dengan cermat, konsisten, dan jelas. Dengan demikian sumber daya sangat penting dalm pelaksanaan kebijakan publik. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan publik antaranya: informan, staf yang memadai, pendanaan, wewenang dan fasilitas pendukung. (Arfandi & Warjio, 2015) dalam Ramdhani dan Ramdhani (2017), (2) disposisi atau sikap pelaksana adalah watak dan karateristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, Seperti disiplin, kejujuran, komitmen, kecerdasan dan sifat demokratis. Wahab (2010) dalam Ramdhani dan Ramdhani (2017). Apabila dalam pelaksanaan kebijakn memiliki disposisi yang baik

maka kebijakan publik akan berjalan dengan baik dan apabila sebaliknya maka akan menimbulkan proses pelaksanaan yang tidak efektif dan efisien, (3) Kewenangan/ struktur birokrasi merupakan otoritas/legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang diterapkan dengan cara politik Arfandi & Warjio (2015) dalam Ramdhani dan Ramdhani (2017). Kelembagaan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristi utama dalam birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau standar operating procedure (SOP) dan fragmentasi organisasi.

Implementasi kebijakan, merupakan tahapan yang sangat penting dan krusial dalam keseluruhan struktur kebijakan. Dan Implementasi suatu kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan. Pengorganisasian tujuan-tujuan tersebut melalui peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain implementasi suatu

kebijakan berkaitan erat dengan faktor manusia dengan berbagai latar belakang aspek sosial, budaya, politik, dan sebagainya. (Tahir, 2015).

Menurut Gordon dalam Muliyadi (2016) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realitas program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, metode-metode dan unit-unit untuk menjalankan suatu program.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Sayumitra (2009) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah/swasta pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan pada keputusan kebijakan.

Dalam hal ini Abdul Wahab dalam Tahir, (2015) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya keputusan

tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan /sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengstruktur/mengatur proses implementasinya. Sebagaimana telah diuraikan bahwa implementasi suatu kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan –tujuan yang telah dipilih dan diterapkan untuk menjadi kenyataan.

Sehubungan dengan itu Anderson dalam Tahir, (2015) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu: Siapa yang dilibatkan dalam implementasi, hakikat proses administrasi, dan keputusan atas suatu kebijakan serta efek atau dampak dari implementasi. Senada dengan itu, Tangkilisan (2002) dalam Tahir (2015) ada tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan yaitu: penafsiran, organisasi dan Penerapan.

Menurut Donal S. Van Meter dan Carle E. Van Horn dalam Subarsono (2011), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, standar dan sasaran kebijakan: standar dan sarana kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan, apabila standar dan sarana

kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

Sumber daya: implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human resources). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti program jaringan pengamanan sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

Hubungan antar organisasi: Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, untuk itu di perlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Karakteristik agen pelaksana: Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan dalam birokrasi, semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

Kondisi sosial politik dan ekonomi: variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sejauh mana

kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

Disposisi implementor: Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni: Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, Kognis yakni pemahaman terhadap kebijakan, Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.

Menurut Wahab dalam Mustari, (2015) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapinya suatu tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Tacjan (2006) dalam Halim (2017) Implementasi kebijakan publik menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

Unsur pelaksana: Pihak pertama yang mempunyai kewajiban untuk

melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif birokrasi pada setiap pemerintahan.

Adanya Program yang dilaksanakan: Kebijakan yang bersifat administratif yang masih berupa persyaratan-persyaratan umum yang berisikan sasaran, tujuan, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi dalam program-program yang bersifat operasional. Dan pada hakikatnya implementasi kebijakan itu adalah implementasi program.

Target group atau kelompok sasaran. Tachjan (2006) dalam Halim (2017) mengartikan target group sebagaimana kelompok orang atau organisasi yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

Menurut Jan Merse dalam Kadji (2015) Implementasi dipengaruhi beberapa faktor-faktor sebagai berikut diantaranya: informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat (fisik dan non fisik), dan Pembagian Potensi.

RKP Desa adalah merupakan suatu rencana kerja penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJM desa) yang dimana disusun 5 tahun sekali dan dalam masa 5 tahun itu terhitung dari tiap tahun, itulah yang disebut RKP desa.

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian secara umum Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. (Sjafrizal, 2015).

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 114 tahun 2014, tentang pedoman perencanaan pembangunan desa (RKP desa) bahwa dalam penyusunan RKP desa tidak boleh dilakukan sepihak. Pada pasal 30 disebutkan kepala desa dalam menyusun RKP desa dengan mengikut sertakan masyarakat desa.

Yang dimana musyawarah desa dilaksanakan oleh badan

permusyawaratan desa (BPD). Kemudian hasil dari musyawarah desa dijadikan pedoman oleh pemerintah desa dalam menyusun RKP Desa dan daftar usulan desa, apabila daftar usulan tersebut diterima dan disetujui oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota maka akan dimuat dalam RKP desa berikutnya.

Menurut Arthur W.Lewis dalam Sjafrizal, (2015) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dalam program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Sistem perencanaan pembangunan nasional berdasarkan undang-undang nomor 25 Tahun 2004 memberikan otonomi penuh kepada daerah untuk merumuskan lebih lanjut kebijakan perencanaan daerah.

Tjokroamidjojo (2008) dalam Husna dan Mardhiah (2018) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu pengarah penggunaan sumber-sumber pembangunan termasuk sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan keadaan sosial

ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Riyadi (2005) dalam Husna perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) bertujuan untuk pedoman atau dasar kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan di desa, sebagai dasar penyusunan aturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dan desa memiliki pedoman atau dokumen tentang perencanaan tahunan yang memiliki kekuatan hukum yang tepat.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian dilakukan kurang lebih dua bulan di Kantor Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini untuk mengetahui pembangunan Desa Bonerate.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus, dengan menggunakan metode

kualitatif. Teknik penentuan informan dilakukan dengan menentukan informan yang berperan dan terlibat secara teknis dalam penelitian ini. Pengumpulan data melalui beberapa teknik yaitu, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tipe trigulasi yaitu trigulasi sumber, trigulasi waktu dan trigulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan merupakan sustau tahapan pengambilan keputusan, seperti undang-undang legislatif, pasal-pasal, dan keluaran sebuah peraturan eksekutif, atau keluarannya standar konsekuensi dan peraturan dari kebijakan bagi masyarakat yang dapat mempengaruhi aspek kehidupannya.

Meskipun kebijakan telah diambil secara tepet tetapi masia danya kemungkinan bahwa masi bisa terjadi kegagalan dalam suatu kebijakan tersebut, jika implementasinya tidak tepat. Dalam hal ini implementasi kebijakan menurut Jan Marse

dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

Informasi

Informasi merupakan indikator pertama yang merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yang digunakan untuk mengetahui tingkat informasi dalam pembangunan Desa Bonerate.

Saat ini informasi sangat berpengaruh dalam pembangunan Desa, oleh karena itu dalam pembangunan penginformasian seperti informasi yang akurat, yang dimaksud disini informasi jelas harus memang nyata dan sesuai fakta atau bebas dari kesalahan, kemudian informasi harus bersifat mudah di mengerti bahwa masyarakat dalam hal ini memahami isi informasi dengan jelas, serta informasi yang tepat waktu yang dimana informasi harus sampai pada masyarakat harus tepat karna apabila terlambat maka tidak akan menghasilkan nilai guna lagi atau tidak bermanfaat lagi bagi masyarakat, dan apabila kesemuanya berjalan dengan baik maka otomatis informasi yang ada pasti akan menghasilkan nilai yang positif bagi pembangunan Desa.

Oleh karena itu di harapkan informasi yang memadai merupakan hal yang sangat menunjang dan sangat

penting dalam pelaksanaan pembangunan desa, terutama dalam hal implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Bonerate.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait informasi dalam implementasi rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan Desa Bonerate bahwa informasi dirasa belum cukupbasik. Dimana meski pemerintah merasa telah member informasi yang baik, tapi masyarakat masih belum memahami dan mengerti mengenai rencana pembangunan desa danhala tersebut akan menimbulkan hal tidak diinginkan dalam pembangunan Desa Bonerate, masyarakat disini selaku stekholder masih kurang paham apa itu rencana pembangunan desa dan masi adanya perbedaan persepsi, yang dimana masyarakat Desa Bonerate beranggapan bahwa setiap rapat yang diadakan pemerintah Desa Bonerte mengenai perencanaan desa itu terkait pembagian bantuan atau sumbangan dari pemerintah untuk dimiliki pribadi oleh masyarakat.

Isi Kebijakan

Isi kebijakan merupakan indikator kedua yang mempengaruhi implementasi, digunakan untuk

mengetahui sejauh mana kesuksesan suatu kebijakan dalam implementasi rencana kerja pemerintah Desa dalam pembangunan Desa Bonerate.

kebijakan harus tepat sasaran sesuai dengan standar kebijakan yang artinya kebijakan dalam implementasi rencana kerja pemerintah desa harus bisa memecahkan masalah-masalah yang ada pada lingkup masyarakat. Oleh karena itu kebijakan merupakan hal yang sangat menunjang dan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait implementasi RKP Desa dalam pembangunan di Desa Bonerate bahwa Kebijakan yang dimaksud disini kebijakan publik, yang diman dengan adanya kebijakan dalam implementasi rencana kerja pemerintah Desa terutama dalam pembangunan desa itu sangat menunjang terhadap peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat desa untuk lebih baik lagi. Namun hasil analisis lapangan peneliti masih ditemukan kesenjangan antar apa yang diharapkan dan hasil yang tidak sesuai dengan kebijakan. Jadi dapat diartikan bahwa Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) selaku

kebijakan dalam pembangunan desa belum tepat sasaran karena masih adanya ketidak sesuaian isi kebijakan dengan apa yang ada di lapangan seperti belum adanya kemandirian masyarakat, serta belum ada kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian masyarakat selaku stekholder dalam peningkatan kesejahteraan Desa Bonerate agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Menurut Douglas Van Meter dan Carle E. Van Horen pada poin pertama yaitu standar sasaran kebijakan harus jelas dan terukur karna apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas maka akan merusak.

Dukungan Masyarakat

Dukungan Masyarakat merupakan indikator ketiga dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi RKP Desa dalam pembangunan Desa Bonerate, yang digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat atau dukungan masyarakat Desa Bonerate dalam pembangunan Desanya. Yang dimaksud disini dukungan masyarakat berbentuk fisik berupa sumbangan tenaga yang diman keikut sertaan masyarakat memperbaiki fasilitas desa, fasilitas berupa batuan barang atau materi guna mendukung pembangunan serta jasa yang diamskut

disini semua dukungan terkait keterampilan atau kemahiran yang dimiliki masyarakat, sedangkan non fisik berupa ide pemikiran seperti saran dan kritik terkait pembangunan desa. Ini semua berkaitan dengan partisipasi masyarakat, karena apabila dalam pelaksanaan kebijakan tidak cukup dukungan maka implementasi kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan. Oleh karena itu dukungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh karena dalam hal ini masyarakat sebagai stakeholder

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimana dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam implementasi rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan Desa Bonerate bahwa Dukungan masyarakat merupakan salah satu hal penunjang dalam pembangunan, baik sebagai individu, kelompok atau kesatuan sistem yang merupakan bagian penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara umum pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam hasil penelitiannya Sarah Nuramalia Putri (2017) bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi beberapa faktor.

Pembangunan Desa Bonerate dalam menyusun hingga melaksanakan program rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan Desa Bonerate. Dimana dalam hal ini dukungan atau partisipasi masyarakat baik dalam bentuk fisik dimana masyarakat Desa Bonerate yang memiliki jiwa gotong royong yang tinggi, serta memberikan bantuan fasilitas guna kebutuhan pembangunan dan membuat usaha kerajinan guna mendorong ekonomi desa, tetapi dengan kesemuanya itu belum cukup memadai dalam pembangunan Desa Bonerate karena selain partisipasi fisik masyarakat, pembangunan Desa juga harus disertai pemikiran kritis dari masyarakat. Masyarakat Desa Bonerate dalam hal ini masih kurang kritis berfikir dalam pemerintahan Desanya. Dikarenakan masih kurangnya kesadaran bahwa pemerintah desa itu membutuhkan aspirasi dari masyarakat selaku stakeholder dan pemerintah hanya pengarah masyarakat agar berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat.

Pembagian Potensi

Pembagian potensi merupakan indikator keempat dari faktor yang dapat mempengaruhi implementasi rencana kerja pemerintah desa dalam

pembangunan Desa Bonerate. Pembagaian potensi merupakan hal sangat berpengaruh dalam implementasi rencana kerja pemerintah Desa yang diman dalam hal ini potensi terbagiatas dua yaitu potensi fisik dalam hal ini suatu desa meliputi segala sesuatu yang mendukung pembangunan yang berkaitan dengan tanah, air, cuaca, ternak, dan manusia sebagai tenaga kerja, sedangkan potensi non fisik yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan sumberdaya budaya seperti sikap gotong-royong dalam masyarakat, adanya lembaga sosial, kemampuan aparatur desa bekerja secara maksimal menjadi sumber ketertiban serta kelancaran pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait pembagian potensi dalam implementasi rencana kerja pemerintah desa dalam Pembangunan Desa Bonerate bahwa Pembagian potensi dalam implentasi kebijakan rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan Desa Bonerate, para pelaksana yang terlibat adalah masyarakat dan pemrintah Desa Bonerate. Pembagain potensi tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan desa yang diman bersentuhan langsung dengan masyarakat selaku stekholder

atau implementor dalam pembangunan desa. Menurut Douglas Van Meter dan Carle E. Van Horen pada poin kedua yaitu implementasi dipengaruhi oleh sumberdaya baik sumber daya manusia amaupun sumber daya alam. Dimana dalam pembagian potensi di Desa Borate terkait implentasi rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Bonerate masih belum cukup karena dipengaruhi beberapa faktor terkait sumberdaya alam atau potensi fisik dan sumber daya manusia atau potensi non fisik yang dimana masi kurang produktifnya tanah pertanian sebagai lahan sumber ekonomi masyrakat, karna dipengaruhi cuaca dan iklim, selain itu penyebab tanah kering disebabkan karna Desa Bonerate berada pada wilayah pantai atau yang dekat dengan pantai, serta masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah dalam memberikan dukungan terkait kelancaran pemerintahan terkait program pembangunan desa guna mewujudkan desa yang maju dan sejahtera.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan tentang implementasi rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Bonerate

dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik, karna masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Hal tersebut dapat diketahui dari teori Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Jan Mase dengan empat indikator diantaranya, Informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, Serta pembagian potensi.

Informasi, implementasi rencana kerja pembangunan desa belum cukup baik, karna masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait rencana kerja pembangunan Desa Bonerate.

Isi kebijakan, kebijakan yang tidak memadai dan tidak tepat sasaran atau hasilnya tidak sesuai keinginan, karena masih adanya isi kebijakan yang tidak terlaksana dengan baik, dimana masih adanya ketidaksesuaian isi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat dalam peraturan Desa Bonerate dengan apa yang ada dilapangan, sehingga kebijakan dalam implementasi rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan Desa Bonerate dapat dikatakan belum tepat sasaran.

Dukungan masyarakat, dukungan atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih kurang baik, dikarenakan masih lemahnya dukungan masyarakat dalam

memeberikan sumbangan pemikiran terhadap pembangunan, dapat diartikan partisipasi masyarakat dalam proses menyadari bahwa untuk mencapai pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat perlunya partisipasi masyarakat, baik fisik maupun non fisik tetapi masyarakat disini hanya menyadari, tidak serta merta mengambil sikap untuk bisa memberi pemikiran mengenai keberlanjutan pembangunan desa kedepannya.

Pembagian Potensi di Desa Bonerate dalam pembangunan desa belum cukup memadai, karena dipengaruhi beberapa faktor seperti tanah yang kurang produktif karena kurangnya kadar air dalam tanah, dan curah hujan dan iklim yang berubah-ubah sehingga susah untuk diprediksi petani dan mengakibatkan gagal panen. dan potensi aparatur desa hanya menguasai bidang masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaturrahman,P. 2016. Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bangan Limau Kecamatan Ukul Kabupaten Pelawan. Jurnal Valute. ISSN: 2502-1419 , Vol 2 No 2 (2016)
- Cristian,H. 2015. *Studi Tentang Pelaksanaan Rencanakerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2013 Desa Lao Janan Ulu Kecamatan LaoJanan Kabupaten Kutai Kartanegara.* eJurnal

- Pemerintahan Integratif. ISSN: 2337-8670, Vol 3 No 1 (2015).
- Endah, K. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat at : Menggali Potensi Lokal Desa*. Jurnal Moderat. ISSN: 2442-3777 (cetak). ISSN: 2622-691X (online), Vol 6 No 1 (2020)
- Florensi, H. 2014. *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*. FISIP. ISSN: 2303 – 341X, Vol 1 No 1 (2013)
- Firyal, M., Suprpto, Srihandayana dan Surati. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimuliya Kabupaten Boalemo*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Cetak ISSN: 2301-573X E-ISSN: 2581-2084. Vol 6 Nomor 2 (2018)
- Hakim, L. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerata Kecamatan Rawamareta Kabupaten Karawang*. Jurnal Politikom Indonesiana. e-ISSN: 2528-2069. Vol 2 No 2 (2017)
- Halim, A. 2017. *Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indra Giri Hilir*. JOM FISIP. Vol 4 No 2 (2017).
- Husna, C.A dan Mardhiah, N. 2018. *Publik Partisipation In Rural Development Playning. Community*. ISSN : 2477-5746, Vol 4 No 2 . (2018)
- Kadji, Y. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo. UNG Press.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta CV.
- Mustari, N. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta. PT Leutika Nouvalitera
- Putri S.N. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Belesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temenggung)*. Semarang. Universitas Diponegoro
- Ramadhani, A dan Ramadhani, M.A. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik. ISSN : 1412-7083, Vol 11 No 01 (2017)
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Era Otonomi*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Aplikasinya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sunusi, A. 2017. *Modifikasi Model Formulasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Perdesaan Berbasis Partisipasi Publik*. Jurnal SAWALA. ISSN: 2302-2231, Vol 5 No 2 (2017).
- Sayumitra, A. 2009. *Implementasi Perencanaan Partisipasi dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*. SKRIPSI. Departemen Ilmu Administrasi Negara. Universitas Sumatra Utara. Aceh Barat.
- Tahir, A. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparans Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung. Alfabeta CV.
- Theresia, Aprilia. Krisna. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung. Alfabeta CV.
- Wrihatnolo, R. R. Dan Dwidjowijoto, R. N. 2007. *Menejemen Pemberdayaan*. Jakarta. PT Elex Media Komputido.